

Manajemen Pendidikan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Minat *Entrepreneurship* melalui Media Digital di Desa Masawah

Nurhidayat¹, Irpan Ilmi²

¹STIT NU Al Farabi Pangandaran; nurhidayat@stitnualfarabi.ac.id

²STIT NU Al Farabi Pangandaran; irpanilmi1@gmail.com

JSTAF :

Siddiq, Tabligh, Amanah,
Fathonah

Vol 05 No 1 January 2026

Hal : 188-203

<https://doi.org/10.62515/staf.v5i1.1115>

Received: 10 January 2026

Accepted: 22 January 2026

Published: 31 January 2026

Publisher's Note:

Publisher: Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) STITNU
Al-Farabi Pangandaran,
Indonesia stays neutral with
regard to jurisdictional
claims in published maps and
institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the
authors. Submitted for
possible open access
publication under the terms
and conditions of the
Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

terdokumentasi secara menyeluruh, serta belum ditopang oleh kepemimpinan yang terstruktur, kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas lembaga, dan sistem evaluasi berbasis kinerja. Studi ini

Abstract ;

This study aims to analyze how human resource management (HRM) education can be optimized to increase entrepreneurial interest through digital media in Masawah Village. The main issues in this study are the low interest in entrepreneurship through digital media and the suboptimal human resource management in Masawah Village. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection techniques through interviews, observation, and documentation with prominent figures in Masawah Village. The research results show that there have been various training initiatives, but HR practices are still carried out informally and have not been fully documented, and are not supported by structured leadership, strong institutions, cross-agency coordination, and a performance-based evaluation system. This study contributes to the limited human resource education management in villages, by highlighting the importance of systematically implementing management functions in building a digital entrepreneurship ecosystem in rural areas, which distinguishes it from previous studies that generally focus on urban contexts or formal institutions.

Keywords ; Human Resource Education Management, Digital Media, Entrepreneurship, Masawah Village.

Abstrak ;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pendidikan sumber daya manusia (MSDM) dapat dioptimalkan dalam meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya minat entrepreneurship melalui media digital dan kurang optimalnya manajerial SDM di Desa Masawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tokoh di Desa Masawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat inisiatif berbagai pelatihan, namun praktik MSDM masih berjalan secara informal dan belum

berkontribusi terhadap manajemen pendidikan SDM di desa yang masih terbatas, dengan menyoroti pentingnya penerapan fungsi manajemen secara sistematis dalam membangun ekosistem entrepreneurship digital di wilayah perdesaan, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada konteks urban atau kelembagaan formal.

Kata Kunci ; *Manajemen Pendidikan Sumber Daya Manusia, Media Digital, Entrepreneurship, Desa Masawah.*

Pendahuluan

Desa Masawah sebagai salah satu desa mandiri di Kabupaten Pangandaran, menghadapi tantangan besar dalam memaksimalkan potensi SDM ditengah perubahan ekonomi digital. Meskipun memiliki sumber daya yang kuat, belum seluruhnya dimanfaatkan melalui pendekatan entrepreneurship melalui media digital. Berbagai pendidikan dan pelatihan telah dilakukan oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun lembaga desa itu sendiri, seperti pelatihan pembuatan garam, kerajinan tangan, pembentukan pelaku sadar wisata melalui pendidikan kepariwisataan, pelatihan digital printing, serta pengembangan dalam bidang lainnya (Indra, 2025).

Rendahnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi entrepreneur digital menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang tersedia dan pemanfaatan yang optimal (Darman et al, 2025). Konteks inilah yang memunculkan kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana manajemen pendidikan SDM berperan dalam menumbuhkan minat entrepreneurship melalui media digital di desa masawah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan urgensi pengelolaan SDM secara strategis dalam mendorong kewirausahaan digital. Saptarianto et al, (2021) dalam studinya “Kewirausahaan di Era Digital” menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen SDM sangat penting untuk peningkatan kinerja wirausaha, meskipun penelitian mereka lebih berfokus pada konteks korporasi dan UMKM perkotaan. Sementara itu, Fittria et al, (2022) melalui pendekatan pengabdian masyarakat berbasis ABCD di BUMDes Kabupaten Kendal menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM berbasis aset lokal, tetapi terbatas pada pelatihan jangka pendek tanpa menelaah aspek manajerial secara mendalam. Penelitian lain oleh Farla (2020) di Desa Kerinjing mengangkat pentingnya perencanaan SDM dalam usaha mikro desa, namun hanya menyoroti satu fungsi manajemen tanpa membahas keterkaitan struktural dan kultural dengan minat wirausaha digital.

Ketiga penelitian diatas memiliki relevansi dalam hal pengembangan SDM di era digital, namun belum secara menyeluruh membahas peran fungsi-fungsi manajemen dalam konteks desa. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana manajemen pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah.

Penting untuk melihat bahwa tantangan bukan terletak pada akses teknologi itu sendiri, karena penetrasi internet dan kepemilikan perangkat digital di Indonesia telah meningkat pesat (Kata Data, 2017) melainkan pada rendahnya kualitas pengelolaan dan pemberdayaan SDM agar mampu mengoptimalkan potensi digital. Gagalnya masyarakat desa dalam mengadaptasi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi bukan disebabkan oleh kurangnya minat semata, tetapi lebih pada lemahnya sistem manajemen pendidikan SDM yang tidak terarah dan tidak terukur (Aromatica et al, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam bagaimana manajemen pendidikan SDM di Desa Masawah dapat berperan strategis dalam menumbuhkan minat serta kapasitas entrepreneurship melalui media digital. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan teori manajemen dari Henri Fayol (1949), yang menekankan lima fungsi utama manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan).

Penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan pendekatan sistemik dalam manajemen pendidikan SDM di desa yang selaras dengan kebutuhan digital.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan model studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan sistem pemeriksaan yang menghasilkan informasi yang jelas berupa kata-kata yang tersusun atau diungkapkan secara lisan dari individu dan perilaku yang nyata (Sugiyono., 2013). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi langsung di Desa Masawah mulai Bulan Februari sampai Bulan Mei 2025. Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera yang perlu direkam dan dicatat secara sistematis (Ela Fatmawati et al., 2025). Kemudian, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekdes, BUMDES, Kaur, Tokoh Pemuda, dan beberapa

pelaku wisata. Sedangkan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Pemerintah desa belum memiliki dokumen perencanaan formal yang secara khusus mengatur pengembangan pendidikan SDM (Sakur, 2025). Upaya penyusunan Peraturan Desa terkait manajemen SDM sedang dirintis, namun substansinya masih terbatas pada aspek pengelolaan perangkat desa, sementara dokumen perencanaan yang tersedia hanya termuat dalam RPJMDes tanpa fokus strategis pada pendidikan dan pelatihan masyarakat (Sakur, 2025). Kegiatan pelatihan yang ada bersifat insidental dan belum dirancang dalam kerangka jangka panjang yang terstruktur.

Pemetaan terhadap potensi SDM juga belum optimal. Meskipun data sempat dihimpun melalui Indeks SDGs Desa, hasilnya belum dimanfaatkan dalam perencanaan program (Muhtar, 2025). Tidak tersedia sistem data yang mencakup informasi keterampilan, minat, dan potensi kewirausahaan masyarakat. Beberapa inisiatif dari komunitas pemuda yang memanfaatkan media sosial untuk memetakan potensi desa masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem resmi desa. Sementara itu, kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM digital mulai tumbuh, tercermin dari inisiatif pengembangan aplikasi layanan desa dan sistem informasi publik berbasis digital. Namun, perencanaan untuk membina masyarakat menjadi pelaku usaha digital masih belum terstruktur.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian pendidikan SDM dalam rangka meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih menunjukkan sejumlah kelemahan struktural dan kelembagaan. Desa belum memiliki lembaga atau tim khusus yang menangani manajemen pendidikan SDM secara profesional (Muhtar, 2025). Pengelolaan kegiatan pengembangan SDM masih tersebar di antara perangkat desa sesuai bidang masing-masing, seperti bidang sosial, pembangunan, atau ekonomi, tanpa adanya struktur kelembagaan yang secara khusus fokus pada pendidikan atau

pemberdayaan masyarakat. BUMDes sebagai entitas yang seharusnya mendukung pemberdayaan ekonomi justru lebih terfokus pada kegiatan komersial seperti pariwisata dan perdagangan, sehingga tidak terdapat unit yang secara khusus menangani program pelatihan atau pendidikan nonformal (Sakur, 2025).

Pembagian peran antar lembaga dalam pengembangan SDM di desa juga bersifat fleksibel dan informal. Perangkat desa, Karang Taruna, BUMDes, dan organisasi masyarakat lainnya seperti PKK dan Fatayat hanya terlibat secara situasional tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas, khususnya dalam pelatihan digital dan pengembangan kewirausahaan pemuda (Indra, 2025). Meskipun partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolaboratif cukup tinggi, tidak adanya kerangka kerja yang jelas dan formal menyebabkan lemahnya koordinasi dan kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan program.

3. Pengarahan

Pengarahan pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih menghadapi berbagai tantangan. Peran kepala desa sebagai pengarah belum maksimal, karena fokus utama pembangunan masih terpusat pada infrastruktur fisik dan belum menempatkan pengembangan kapasitas manusia sebagai prioritas (Sakur, 2025). Tokoh-tokoh lokal seperti pengurus Karang Taruna, PKK, Fatayat, dan BUMDes telah memberikan dukungan terhadap inisiatif pemuda, namun kontribusi mereka bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam strategi pembinaan jangka panjang yang terstruktur (Indra, 2025).

Strategi untuk memotivasi pemuda juga belum dirancang secara sistematis. Sejauh ini, motivasi lebih banyak muncul dalam bentuk respons terhadap kesempatan yang ada, seperti pelatihan temporer atau partisipasi dalam program tertentu. Belum tersedia program yang secara khusus ditujukan untuk membangun semangat kewirausahaan digital secara berkelanjutan, seperti forum mentoring, beasiswa pelatihan, atau sistem penghargaan bagi pelaku usaha muda yang berprestasi (Ukan, 2025). Aktivitas motivasional seperti diskusi informal atau pelatihan singkat masih bersifat spontan, tanpa kurikulum atau panduan yang jelas, sehingga banyak ide pemuda tidak tersalurkan secara optimal.

Dari sisi pendekatan kepemimpinan, kepala desa dan perangkatnya masih mengandalkan pola administratif umum tanpa menerapkan pendekatan edukatif,

religius, atau sosial yang berorientasi pada pembinaan dan pemberdayaan pemuda di bidang entrepreneurship digital (Sakur, 2025). Hal ini menunjukkan belum adanya pola kepemimpinan yang secara khusus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan berbasis teknologi informasi di tingkat desa.

4. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih belum berjalan secara optimal. Koordinasi internal antarperangkat desa tidak memiliki pola yang baku dan lebih banyak bersifat informal. Rapat rutin, pertemuan teknis, atau diskusi santai menjadi media utama koordinasi, namun semua itu bersifat situasional dan bergantung pada kebutuhan sesaat, bukan bagian dari perencanaan manajerial yang sistematis (Indra, 2025). Tidak adanya unit atau struktur khusus yang secara eksplisit bertanggung jawab untuk mengatur dan mengoordinasikan seluruh proses pendidikan SDM menyebabkan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas seringkali tidak berkesinambungan.

Di luar perangkat desa, lembaga-lembaga lokal seperti BUMDes, Karang Taruna, PKK, dan Fatayat memang terlibat dalam pengembangan SDM, namun belum ada forum atau wadah koordinasi yang mengintegrasikan seluruh lembaga tersebut secara rutin (Indra, 2025). Kolaborasi antarlembaga biasanya terjadi berdasarkan kebutuhan kegiatan tertentu atau inisiatif individu, bukan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Hal ini menjadikan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM sulit dirancang dalam kerangka jangka panjang yang terkoordinasi.

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih terbatas pada aspek administratif dan teknis. Evaluasi program pengembangan SDM dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada pertengahan dan awal tahun, namun fokus utamanya masih sebatas pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan (Sakur, 2025). Evaluasi terhadap hasil pembelajaran atau peningkatan kapasitas peserta pelatihan belum menjadi bagian dari proses evaluasi secara menyeluruh (Indra, 2025). Selain itu, kegiatan evaluasi belum dilengkapi dengan instrumen penilaian yang baku, dan refleksi pasca-program umumnya hanya dilakukan melalui laporan lisan dalam forum musyawarah desa, yang cenderung kurang sistematis.

Indikator keberhasilan program pendidikan SDM juga belum ditetapkan secara formal. Penilaian keberhasilan selama ini lebih banyak didasarkan pada output kegiatan, seperti jumlah pelatihan yang terlaksana atau capaian pendapatan dari unit usaha BUMDes. Indikator yang bersifat kualitatif: misalnya peningkatan literasi digital, pertumbuhan jumlah pemuda wirausaha, atau perubahan perilaku ekonomi masyarakat setelah pelatihan belum digunakan secara konsisten. Ketiadaan indikator yang holistik ini menyulitkan proses pengawasan substansi terhadap efektivitas program pengembangan SDM dalam jangka panjang.

Lembaga desa seperti BUMDes dan perangkat terkait biasanya menjadi pelaksana sekaligus pengawas kegiatan SDM, dengan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi pengawasan umum. Namun, pengawasan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif seperti pelaporan anggaran, tanpa menyentuh dimensi kualitas program atau keberhasilannya dalam membentuk pelaku usaha digital. Tidak adanya sistem pelaporan khusus mengenai perkembangan SDM membuat pengawasan terhadap keberlanjutan program menjadi lemah. Akibatnya, banyak kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang berjalan tanpa pengawasan substansi dan tanpa evaluasi dampak jangka panjang terhadap masyarakat desa secara menyeluruh.

Pembahasan pada penelitian ini ialah;

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa perencanaan pendidikan SDM di Desa Masawah dalam konteks peningkatan minat entrepreneurship melalui media digital masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan substansial. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip perencanaan yang menekankan bahwa perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan sistematis (Arifudin et al, 2021).

Perencanaan adalah fungsi manajemen pertama yang menjadi fondasi bagi fungsi lainnya (Imi, I., Dian, D., Basri, H., & Thohir, A. 2025). Dalam konteks Desa Masawah, belum adanya dokumen perencanaan formal yang secara khusus memuat strategi pengembangan pendidikan SDM menandakan bahwa proses perencanaan belum menjadi bagian integral dari tata kelola desa. RPJMDes yang ada pun masih bersifat umum dan belum memuat fokus strategis terhadap pendidikan kewirausahaan atau pelatihan

berbasis digital. Hal ini mengakibatkan program-program pelatihan yang diselenggarakan bersifat insidental, tidak terstruktur dalam kerangka jangka panjang, serta belum dikaitkan dengan indikator keberhasilan yang terukur (Indra, 2025).

Menurut Herman Sofyandi (2018), perencanaan MSDM yang baik harus dimulai dengan pemetaan kebutuhan dan potensi SDM, disusun dengan penyusunan tujuan, strategi, dan langkah-langkah operasional yang jelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemetaan potensi SDM melalui data Indeks SDGs Desa telah dilakukan, namun belum diolah dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan (Sakur, 2025). Ketidakhadiran sistem informasi SDM yang memuat data tentang keterampilan, minat, dan potensi kewirausahaan masyarakat menjadi hambatan serius dalam perencanaan berbasis kebutuhan (need-based planning). Tanpa data yang akurat dan terstruktur, perencanaan program menjadi spekulatif dan cenderung tidak efektif.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes sebenarnya memberikan ruang demokratis bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan desa. Keterlibatan pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat merupakan hal yang positif, namun partisipasi ini masih bersifat seremonial karena belum didukung oleh kapasitas teknis dan metodologi perencanaan (Fonataba, et al, 2025). Masyarakat desa, termasuk para pemuda dengan potensi digital, belum dilibatkan dalam proses desain program secara substansial, apalagi dalam tahapan pengambilan keputusan strategis. Padahal, pelibatan aktor lokal dalam merancang program dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program pelatihan.

Dari sisi inisiatif, beberapa upaya pengembangan layanan desa berbasis aplikasi digital dan pemanfaatan media sosial oleh komunitas pemuda mencerminkan tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya digitalisasi. Dalam perspektif digital entrepreneurship, sebagaimana dijelaskan oleh Alamsyah et al. (2021), transformasi kewirausahaan berbasis media digital membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan berbasis teknologi, pendampingan, infrastruktur, serta integrasi dengan sistem informasi desa. Sayangnya, pelatihan yang diselenggarakan di Desa Masawah, seperti untuk pelaku wisata atau pengolah produk lokal, masih eksperimental dan tidak disertai dengan follow-up atau pendampingan lanjutan. Ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme pembinaan berkelanjutan yang terintegrasi dalam perencanaan desa.

2. Pengorganisasian

Temuan penelitian mengenai pengorganisasian pendidikan SDM di Desa Masawah dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital menunjukkan adanya kelemahan pada struktur kelembagaan, pembagian peran, serta sistem koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengorganisasian menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajerial penting untuk mengelompokkan kegiatan, menentukan tanggung jawab, membentuk struktur hubungan, serta menyusun sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Putri & Nisrina, 2022).

Di Desa Masawah, belum terbentuknya lembaga atau unit khusus yang secara profesional mengelola pendidikan SDM mengindikasikan lemahnya struktur organisasi yang mendukung pengembangan kapasitas masyarakat. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan tersebar pada bidang-bidang yang berbeda di dalam struktur perangkat desa tanpa sinergi yang terarah, sehingga program seringkali bersifat sektoral, terpisah, dan tidak berkelanjutan (Indra, 2025). Menurut Herman Sofyandi (2018), pengorganisasian dalam MSDM menuntut adanya sistem yang mampu menyatukan visi, peran, dan fungsi antarunit kerja dalam pengembangan SDM secara strategis dan terukur.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya integrasi antara lembaga desa seperti BUMDes, Karang Taruna, PKK, dan organisasi keagamaan seperti Fatayat yang belum memiliki pembagian peran yang jelas dalam pengembangan SDM digital. Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan kolaboratif, ketidakhadiran struktur formal dan kerangka kerja koordinatif yang baku menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan program serta minimnya alat evaluasi yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan intervensi pelatihan.

Selain itu, koordinasi yang selama ini hanya dilakukan secara informal melalui forum mingguan dan musyawarah desa tidak cukup untuk mengelola kompleksitas program pelatihan dan pendidikan masyarakat. Sistem koordinasi formal dan terstruktur sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan integrasi antarprogram (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Ketidakterpaduan dalam pelaksanaan pelatihan, seperti pelatihan garam dan wisata digital yang dilaksanakan secara terpisah tanpa follow-up menunjukkan bahwa Desa Masawah belum memiliki mekanisme manajerial yang mampu mengorkestrasi berbagai inisiatif pelatihan ke dalam satu sistem pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Kemitraan dengan pihak eksternal, meskipun pernah terjadi, belum menunjukkan keberlanjutan. Kolaborasi dengan kampus, NGO, maupun pendamping desa belum dibingkai dalam sistem kerja sama yang strategis dan jangka panjang. Padahal, pendekatan kolaboratif lintas sektor sangat diperlukan untuk membangun kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan dunia digital. Menurut Alamsyah et al. (2021), ekosistem digital entrepreneurship membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Tidak adanya unit di dalam BUMDes yang mengelola pelatihan atau program pengembangan kapasitas, dan minimnya mekanisme kemitraan yang mapan, menjadi faktor penghambat utama dalam membangun jaringan kewirausahaan digital di kalangan pemuda desa.

Lemahnya fungsi pengorganisasian ini tidak semata-mata mencerminkan kurangnya sumber daya, tetapi lebih pada belum terbentuknya kesadaran institusional bahwa pengembangan SDM harus dikelola secara sistematis, dengan kelembagaan yang kuat dan fungsi yang terdefinisi. Penguatan pengorganisasian memerlukan pembentukan unit khusus atau tim kerja yang fokus pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan masyarakat, serta perlu ditopang oleh pembagian peran yang jelas, sistem koordinasi yang efektif, dan manajemen kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu komponen penting yang mencakup upaya untuk memberikan arahan, membimbing, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan agar mencapai tujuan organisasi secara efektif (Aditama, 2020). Dalam konteks pengembangan pendidikan SDM untuk meningkatkan minat entrepreneurship digital di Desa Masawah, fungsi pengarahan ini belum berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa sebagai aktor utama dalam fungsi pengarahan belum menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama pembangunan, yang masih lebih terfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur (Sakur, 2025).

Ketidakhadiran strategi pengarahan yang terencana menunjukkan bahwa fungsi ini belum dipahami sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan, sebagaimana ditegaskan dalam teori MSDM oleh Sofyandi (2018), bahwa pengarahan merupakan proses penting dalam menggerakkan potensi sumber daya manusia melalui komunikasi

efektif, motivasi, dan kepemimpinan. Tokoh-tokoh lokal seperti pengurus Karang Taruna, PKK, Fatayat, dan BUMDes memang telah terlibat dalam beberapa inisiatif, tetapi keterlibatan mereka belum terintegrasi dalam sistem pembinaan yang sistematis dan berjangka panjang.

Strategi motivasi terhadap pemuda untuk terlibat dalam wirausaha digital masih bersifat reaktif, hanya muncul sebagai respons terhadap program eksternal atau pelatihan jangka pendek. Tidak adanya program pembinaan seperti forum mentoring, sistem insentif, atau program beasiswa pelatihan menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme pengarahan yang mampu menjaga kesinambungan motivasi dan mendampingi perkembangan kompetensi pemuda secara bertahap. Dalam konteks manajemen SDM modern, upaya pengarahan seharusnya dirancang dalam bentuk strategi motivasional terstruktur, yang melibatkan perencanaan pembinaan karier, sistem insentif berbasis prestasi, serta pendekatan personal dan sosial yang relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Di sisi lain, munculnya sejumlah pemuda yang telah memulai usaha berbasis digital seperti jual beli online, pembuatan konten digital, dan promosi produk lokal melalui media sosial, seharusnya dapat menjadi titik awal pembentukan model pengarahan berbasis peer mentoring (Indra, 2025). Figur pemuda yang aktif dan berprestasi dapat dijadikan role model atau agen perubahan (agent of change) untuk menularkan semangat dan keterampilan kepada pemuda lainnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara strategis oleh pemerintah desa.

Ketiadaan program yang mengangkat figur-figur muda ini dalam sistem pelatihan, mentoring, atau komunitas wirausaha digital desa mencerminkan kurangnya inovasi dalam strategi pengarahan. Menurut teori pengembangan komunitas digital, keterlibatan pemuda dalam peran produktif dan simbolik sangat penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang hidup dan berdaya saing. Dengan demikian, pendekatan pengarahan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Desa Masawah perlu diperluas, dari sekadar pendekatan administratif ke arah pendekatan kepemimpinan transformasional dan motivasional.

4. Pengkoordinasian

Fungsi koordinasi bertujuan untuk menyatukan berbagai aktivitas dan upaya dalam organisasi agar selaras menuju pencapaian tujuan bersama (Firmansyah et al, 2022). Dalam konteks pengembangan pendidikan SDM untuk mendorong minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi belum berjalan secara optimal, baik di tingkat internal desa maupun dalam jejaring eksternal.

Secara internal, koordinasi antarperangkat desa masih bersifat informal dan situasional, bergantung pada kebutuhan jangka pendek tanpa perencanaan terpadu. Rapat mingguan, diskusi teknis, atau pertemuan santai menjadi ruang koordinasi utama, namun tidak didukung oleh sistem kerja yang berkelanjutan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip koordinasi terstruktur dalam MSDM, yang menurut Sofyandi (2018) harus mencakup mekanisme yang jelas dalam mengintegrasikan fungsi, peran, dan tanggung jawab berbagai unit kerja yang terlibat dalam pengembangan SDM. Tidak adanya struktur atau unit khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap koordinasi pendidikan dan pelatihan masyarakat menyebabkan program pelatihan yang ada sering terpisah, tidak berkelanjutan, dan tidak terarah pada tujuan jangka panjang.

Kelemahan dalam koordinasi juga terlihat dari hubungan antara perangkat desa dengan lembaga lokal seperti BUMDes, Karang Taruna, PKK, dan Fatayat. Meskipun lembaga-lembaga ini aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, tidak tersedia forum koordinatif yang mempertemukan mereka secara reguler dan sistematis. Kolaborasi hanya muncul pada kegiatan-kegiatan tertentu atau berdasarkan inisiatif individu. Tidak adanya integrasi kelembagaan menyebabkan sulitnya merancang program lintas sektor yang saling mendukung dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam bidang digital entrepreneurship.

Tidak adanya penunjukan formal terhadap koordinator atau fasilitator pengembangan SDM turut memperlemah koordinasi. Fungsi koordinasi hanya melekat secara informal pada beberapa jabatan teknis seperti kaur perencanaan atau pengurus BUMDes, yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab utama di bidang lain. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengelolaan terpadu atas kegiatan pelatihan, tidak tersusunnya kalender kegiatan, dan tidak tersedianya roadmap pengembangan SDM desa. Padahal, manajemen berbasis sistem membutuhkan peta jalan yang dapat dijadikan

acuan oleh semua pemangku kepentingan untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi antarprogram.

Kelemahan koordinasi tidak hanya terjadi secara internal, tetapi juga terlihat jelas dalam hubungan dengan mitra eksternal. Kerja sama dengan lembaga luar seperti NGO, institusi pendidikan, atau pendamping desa sejauh ini bersifat insidental dan belum dikembangkan ke arah kemitraan strategis jangka panjang. Kegiatan pelatihan digital dan usaha kreatif yang pernah melibatkan komunitas seperti Rungkat tidak diikuti dengan mekanisme pendampingan, evaluasi bersama, atau kesepakatan tindak lanjut. Ketidakhadiran unit khusus atau personel yang bertugas menjembatani hubungan dengan mitra eksternal membuat relasi kolaboratif tidak berkembang dan tidak dikelola secara profesional.

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap pendidikan SDM dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital di Desa Masawah masih menunjukkan keterbatasan, baik dari segi sistem maupun substansi. Evaluasi program pengembangan SDM umumnya dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada pertengahan dan awal tahun (Sakur, 2025). Namun, evaluasi tersebut cenderung berorientasi pada aspek administratif, seperti kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tanpa mengukur sejauh mana program tersebut berdampak terhadap peningkatan kapasitas peserta atau perubahan perilaku kewirausahaan.

Evaluasi yang dilakukan belum disertai instrumen penilaian yang baku. Forum evaluasi, seperti musyawarah desa, lebih menekankan pada pelaporan lisan yang bersifat umum dan belum menyediakan ruang refleksi yang mendalam terkait keberhasilan program. Tidak adanya standar evaluasi atau indikator yang komprehensif juga menyebabkan pengawasan hanya menilai aspek kuantitatif, seperti jumlah pelatihan yang diselenggarakan atau laporan kegiatan, tanpa menyentuh aspek kualitatif seperti peningkatan literasi digital, partisipasi pemuda dalam wirausaha, atau dampak jangka panjang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Sistem monitoring terhadap program pelatihan dan pemberdayaan belum terbentuk secara fungsional. Data yang telah dikumpulkan melalui survei SDGs Desa belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat bantu untuk memantau perkembangan kompetensi SDM. Selain itu, mekanisme umpan balik dari peserta

pelatihan tidak diformalkan; evaluasi lebih banyak dilakukan melalui diskusi informal atau komunikasi langsung antarperangkat desa, yang tidak memberikan data objektif dan terukur untuk perbaikan program ke depan.

Dalam hal kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan program SDM sebagian besar berada di tangan perangkat desa dan BUMDes, dengan pengawasan umum oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, pengawasan tersebut masih terfokus pada pertanggungjawaban administratif dan keuangan, bukan pada kualitas substansi program. Tidak adanya pelaporan khusus yang memuat perkembangan SDM secara berkala juga menjadi hambatan dalam proses supervisi. Tanpa laporan kemajuan yang mendalam dan sistematis, upaya pemantauan terhadap keberhasilan program pengembangan kewirausahaan digital sulit dilakukan secara berkelanjutan.

Kelemahan dalam sistem pengawasan ini membuat berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Masawah berisiko tidak berkelanjutan. Minimnya evaluasi substansi juga menjadikan program-program tersebut tidak dapat dikembangkan atau direplikasi dengan pendekatan yang lebih strategis. Oleh karena itu, pengawasan dalam bentuk pemantauan hasil, evaluasi dampak, serta penggunaan indikator yang relevan menjadi sangat penting untuk mengarahkan pengembangan SDM secara efektif di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan sumber daya manusia (MSDM) di Desa Masawah dalam upaya meningkatkan minat entrepreneurship melalui media digital masih menghadapi berbagai kelemahan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Program pelatihan yang ada masih bersifat insidental, belum terstruktur dalam kerangka strategis jangka panjang, serta tidak didukung kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang visioner, dan sistem evaluasi berbasis kinerja. Meski terdapat inisiatif dan partisipasi masyarakat, terutama pemuda, upaya tersebut belum terintegrasi dalam sistem manajerial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis untuk membangun ekosistem kewirausahaan digital di desa, sehingga potensi SDM dapat dimaksimalkan dan minat masyarakat terhadap entrepreneurship berbasis digital dapat tumbuh secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar manajemen*. Ae Publishing.
- Alamsyah, *Kewirausahaan Digital*, Pt Penamuda Media. Yogyakarta: 2024
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MAALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162-183.
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Darman, D., & Akadji, I. (2025). Pelatihan Bisnis Kreatif Berkelanjutan Bagi Generasi Muda. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 3(03), 175-182.
- Farla, W., Zunaidah, Z., Nailis, W., & Siregar, L. D. (2022). *Perencanaan Sdm Pada Era Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Di Desa Keringing*. Jurnal Abdimas Mandiri, 6(1). <https://doi.org/10.36982/Jam.V6i1.2075>
- Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti, S. (2022). Koordinasi pendidikan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 109-128.
- Fittria, A., Imron, A., Rusmadi, R., & Adzkiya', U. (2022). *Optimalisasi Manajemen Sdm Dan Digitalisasi Pada Bumdes Di Kabupaten Kendal*. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. <https://doi.org/10.21580/Dms.2022.221.9687>
- Fonataba, Y., Hombore, E., Nathan, I. A., & Konorop, S. Y. (2025). Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Kampung dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Kabupaten Merauke. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 353-364.
- Henri Fayol, General And Industrial Management, Translated By Constance Storrs (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., 1949), 6.
- Herman Sofyandi Dalam R Supomo & Nurmayati, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yrama Widya: Bandung (2018)
- Id, Ela Fatmawati A., et al. "Pengumpulan Data Penelitian." *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)* 15.2 (2025): 29-39.
- Ilmi, I., Dian, D., Basri, H., & Thohir, A. (2025). Event-Based Planning for Multicultural Education in Vocational High Schools: Evidence from Bakti Karya Parigi Pangandaran, Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 11(02), 235-244.
- Indra. (2025). Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDes Masawah.
- Indra. (2025). Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Masawah.

- Kata Data, Kata Data News & Research (Daring), 22 Mei 2017, “Pertumbuhan Pengguna Internet, Indonesia No.1 Di Dunia”
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. In *Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhtar. (2025). Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Masawah.
- Putri, G. A. M., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature view pengorganisasian: SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286-299.
- Sakur. (2025). Hasil Dokumentasi dengan Kaur Perencanaan Desa Masawah.
- Sakur. (2025). Hasil Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Masawah.
- Saptarianto, H., Lubis, A. Y., & Siburian, V. R. (2023). *Kewirausahaan Di Era Digital: Meningkatkan Kinerja Wirausaha Melalui Manajemen Sdm Di Era Digitalisasi*. *Jurnal Visi Manajemen*, 11(2). <https://doi.org/10.56910/jvm.V11i2.528>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ukan. (2025). Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Masawah.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1323-1332.